

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proses peralihan kekuasaan dari Amangkurat I ke tangan Amangkurat II telah mengalami problematika yang cukup rumit. Pasalnya pasca kematian Amangkurat I, Mataram masih terjebak dalam kekacauan yang disebabkan oleh pemberontakan Trunajaya. Amangkurat II yang sebelumnya bersekutu dengan Trunajaya memilih untuk berpindah keberpihakan dengan melakukan perlawanan kepada kelompok pemberontak yang pernah ia dukung itu. Pada mulanya, posisi Amangkurat II sebagai raja telah tergeser digantikan dengan saudaranya, Pangeran Puger. Namun setelah sang ayah wafat, Amangkurat II mendeklarasikan dirinya sebagai raja yang sah atas Mataram.<sup>1</sup>

Demi mempertahankan kedudukan dan menstabilkan kondisi Mataram dari kericuhan yang terjadi membuat Amangkurat II meminta bantuan dan dukungan kepada pihak yang kuat, yaitu VOC. Demikian dalam menghadapi problematika yang terjadi telah mendorong Amangkurat II untuk melakukan sebuah kesepakatan dengan VOC yang ditandatangani sepanjang tahun 1677 di Jepara.<sup>2</sup> Maka, dengan

---

<sup>1</sup> Sartono Kartodirjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*. (Yogyakarta: Ombak, 2018), hlm. 227.

<sup>2</sup> Amangkurat II dengan VOC melakukan serangkaian perjanjian mulai dari bulan Februari tahun 1677 sampai bulan Januari tahun 1678. Hal ini dapat dilihat melalui arsip perjanjian dalam Heeres, J.E. *Corpus Diplomaticum*

resminya perjanjian ini menandakan bahwa Mataram telah siap untuk menerima segala resiko yang terjadi setelahnya, termasuk dengan menjadikan sisi bagian Barat Mataram menjadi jaminan kepada VOC.

Penandatanganan perjanjian 1677 ini menjadi bukti bahwa Mataram telah kehilangan kekuasaannya atas wilayah sebagian dari wilayah Barat-nya, yaitu Cirebon dan Priangan. Bayaran mahal atas resiko yang terjadi di Mataram telah memberikan dampak yang signifikan bagi wilayah-wilayah ini. Sementara VOC menjadi pihak yang paling banyak diuntungkan sehingga membuat Cirebon dan Priangan berada dalam posisi yang dirugikan, meskipun Mataram hanya menjadikannya sebagai wilayah “gadaian” kepada VOC. Di sisi lain, kesepakatan ini menjadi pintu awal bagi VOC untuk semakin meluaskan kekuasaannya, dalam hal ini memonopoli perdagangan di wilayah Jawa bagian Barat.

Sejak awal Cirebon dan Priangan merupakan sebuah kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sampai terjadinya proses Islamisasi di wilayah ini.<sup>3</sup> Saat kerajaan Sunda mengalami keruntuhan, banyak dari wilayah-wilayah yang dimilikinya memilih untuk lepas dari kungkungan kekuasaan terdahulu dan mulai mengelola wilayahnya sendiri, sebagai mana Cirebon telah mendeklarasikan wilayahnya yang awalnya berstatus

---

*Neerland-Indicum Jilid III (1676-1691)*. (Leiden: Koninklijk Instituut Voor Tal-, Land- En Volkenkunde (KITLV), 1934), No. 91.

<sup>3</sup> Eko Yulianto., et al. *Geliat Kota Bandung Dari Kota Tradisional Menuju Modern*, (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2020), hlm. 15.

sebagai bawahan kerajaan Sunda menjadi Kerajaan Islam pertama di Jawa Barat di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati dengan luas pengaruhnya hampir mencapai seluruh Priangan. Baru setelahnya banyak berdiri kerajaan-kerajaan lainnya seperti Banten dan Sumedanglarang.

Kehadiran VOC di Cirebon dan Priangan baru terasa pada tahun 1680-an, ketika Kompeni merasa bahwa wilayah ini memiliki potensi yang besar untuk memenuhi komoditas-komoditas VOC dalam urusan perdagangan. Namun, intervensi VOC tidak secara langsung nampak dipermukaan, hal ini karena Kompeni lebih dulu untuk mencermati kondisi yang sedang terjadi di wilayah ini. Situasi di Cirebon saat itu telah diwarnai oleh konflik internal, terutama setelah pembebasan para pangeran yang ditahan di istana Mataram. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan kekuasaan sampai akhirnya Kesultanan Cirebon terbagi menjadi tiga penguasa sebagai bentuk dari upaya untuk menghindari perpecahan di antara saudara.<sup>4</sup> Setelah mencermati problematika yang terjadi membuat VOC mulai menjalankan misi untuk menanamkan pengaruhnya di Cirebon.

Sementara sejak tahun 1677 di wilayah Priangan lainnya, yang kebanyakan terdiri dari daerah-daerah kecil yang dikepalai oleh Bupati, dimanfaatkan oleh VOC dengan mulai menanamkan pengaruhnya untuk mengambil alih kontrol

---

<sup>4</sup> Bahru Rozi & Ahmad Misbah. "Sejarah Kesultanan Cirebon Dan Problematikanya Tahun 1677-1752". *Jurnal Batutah*, Vol. 1, No. 1, 2022. Hlm. 26.

dalam penunjukan dan pengangkatan jabatan bupati. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa VOC dapat mengendalikan produksi dan perdagangan rempah-rempah di daerah pegunungan tersebut.<sup>5</sup>

Intervensi VOC telah menciptakan perubahan dalam struktur politik lokal yang menyebabkan ketidakstabilan sosial dan memicu konflik internal di dalamnya. Situasi politik yang tidak stabil dan kebijakan VOC telah membawa dampak yang luas dan berkelanjutan yang dimulai dari statusnya sebagai gadaian bagi kehidupan masyarakat di Cirebon dan Priangan. Berdasarkan permasalahan yang timbul di wilayah tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut dan meneliti lebih mendalam mengenai **“Dinamika Perjanjian Jepara 1677 Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Cirebon Dan Priangan”**.

## **B. Pembatasan Masalah**

Batasan masalah dibuat agar penelitian ini memiliki fokus yang lebih terarah sekaligus untuk menghindari keluasan dalam pembahasan. Merujuk pada latar belakang yang telah diterangkan sebelumnya, penelitian ini akan difokuskan pada dampak yang dialami oleh masyarakat Cirebon dan Priangan, yang merupakan wilayah vasal Mataram yang telah digadaikan oleh Amangkurat II melalui perjanjian di Loji Belanda,

---

<sup>5</sup> Mumuh Muhsin. *Priangan Dalam Arus Dinamika Sejarah*. (Bandung: Unpad Press, 2011), hlm. 17.

Kabupaten Jepara pada tahun 1677.<sup>6</sup> Akibatnya, VOC semakin banyak terlibat ke dalam urusan internal di masing-masing wilayah sehingga membawa Cirebon dan Priangan dalam kemerosotan-kemerosotan dari adanya kebijakan yang telah diterapkan oleh Kompeni.

Demikian perlu dipahami bahwa penelitian penulis hanya dibatasi periode kajian hanya pada saat Cirebon dan Priangan masih dalam status gadai, sehingga dalam proses penerapan pengaruhnya, VOC juga dihadapkan pada sejumlah konflik internal yang memicu mereka untuk terlibat secara terus menerus di dalamnya. Hal ini tentunya memiliki kondisi yang berbeda terkait dampak yang dirasakan oleh wilayah vasal Mataram tersebut sebelum status mereka berubah menjadi milik VOC seutuhnya pada tahun 1705.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi terjadinya perjanjian Jepara yang telah disepakati oleh VOC dan kesultanan Mataram?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perjanjian ini terhadap kehidupan masyarakat di Cirebon dan Priangan?

---

<sup>6</sup> M. C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Yogyakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 189.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami konteks terjadinya perjanjian Jepara yang disepakati oleh VOC dan Amangkurat II.
2. Untuk mengetahui dampak yang disebabkan dari perjanjian tersebut dalam kehidupan masyarakat Cirebon dan Priangan yang termasuk dalam wilayah vasal Mataram.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam karya ilmiah yaitu:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi sumbangan berharga dalam pemahaman sejarah politik Mataram, Cirebon dan Priangan. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat melengkapi riset yang telah dilakukan sebelumnya, mengingat minimnya kajian yang mendalami tentang aspek ini sehingga studi ini akan menjadi referensi berharga bagi riset berikutnya sebagai materi penelitian serta sumber informasi terkait sejarah Cirebon, Priangan dan VOC.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi penulis sendiri, institusi pendidikan, dan masyarakat umum. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang Sejarah Indonesia, khususnya terkait

dengan Mataram Islam, terutama bagi konteks perjanjian dengan VOC pada tahun 1677 yang berdampak pada penguasaan wilayah vasal Mataram dan masyarakatnya. Demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang bernilai serta menjadi referensi pembelajaran mengenai kehidupan melalui peristiwa sejarah yang terjadi.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah tahap yang tak terpisahkan dalam penelitian ini, yang tidak hanya bertujuan untuk memperkuat, tetapi juga membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yang relevan.<sup>7</sup>

Pada konteks pembahasan mengenai Mataram Islam, telah banyak dikaji melalui berbagai jenis literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat landasan teori dan metodologi penelitian dengan memberikan gambaran yang komprehensif tentang sudut pandang yang telah ada sebelumnya dalam penelitian tentang Mataram Islam. Dengan demikian, penulis akan menjabarkan mengenai penelitian terdahulu tentang Mataram Islam sebagai bagian dari *literature review* untuk menguatkan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “*Perjanjian 7 Januari 1681 Terhadap Kehidupan Sosial, Politik, dan Ekonomi di Kerajaan*”

---

<sup>7</sup> Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan”. *Jurnal Alacrity*, Vol. 01, No.02, 2021. Hlm. 3

*Cirebon (1681 M-1755 M)*” karya Firliana Tiya Deviani, seorang mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2016, merupakan sebuah kajian yang mendalam tentang peran VOC dalam perjanjian persahabatan yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1681 dengan para raja di Cirebon. Pada penelitiannya, Firliana memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang konteks historis perjanjian tersebut serta menyoroti bagaimana kesepakatan tersebut memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat selama periode waktu tertentu, dari tahun 1681 hingga 1755.<sup>8</sup>

Dengan demikian penelitian Firliana telah menjadi penghubung yang cukup erat dengan keterkaitan pada topik pembahasan yang sedang penulis teliti. Hal ini karena kesamaan yang terletak pada analisis dampak yang dirasakan oleh masyarakatnya. Adapun perbedaan penelitian Firliana dengan penulis terletak pada fokus kajian yang berbeda. Firliana menitikberatkan pada analisis dampak terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi di kerajaan Cirebon terhadap perjanjian 7 Januari tahun 1681, sedangkan penulis lebih memusatkan perhatian pada konsekuensi dari perjanjian sebelumnya, yaitu ketika Cirebon dan Priangan digadaikan oleh penguasa Mataram dalam perjanjian Jepara tahun 1677.

Pada penelitian ini, penulis mengungkapkan dampak historis dari peristiwa tersebut terhadap dinamika sosial,

---

<sup>8</sup> Firliana Tia D. Skripsi: *Perjanjian 7 Januari 1681 Terhadap Kehidupan Sosial, Politik, dan Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681 M-1755 M)*. (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2016).



politik, dan ekonomi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat setempat. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian tersebut berhubungan dengan sejarah Cirebon, fokusnya berbeda dan menyoroti periode waktu yang berbeda pula.

Skripsi yang berjudul “*Dinamika Kerajaan Mataram Islam Pasca Perjanjian Giyanti Tahun 1755-1830*” karya Komar Faridi, seorang mahasiswa dari Universitas Jember pada tahun 2017, merupakan sebuah skripsi yang mengulas tentang periode pasca perjanjian Giyanti antara VOC dan kesultanan Mataram. Perjanjian tersebut diawali dari ketegangan mengenai kekuasaan di kerajaan Mataram, yang akhirnya menghasilkan keputusan signifikan bagi masa depan kerajaan ini. Keputusan tersebut mencakup pemisahan wilayah kerajaan Mataram menjadi dua entitas, yakni Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat.<sup>9</sup>

Kesamaan penelitian Komar dengan penulis terletak pada pengaruh dari penggunaan perjanjian sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada dengan bantuan VOC. Sementara itu, perbedaannya dapat dilihat dari fokus permasalahan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pada skripsinya, Komar memusatkan perhatian pada dinamika yang terjadi di Kerajaan Mataram setelah Perjanjian giyanti disepakati, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengaruh perjanjian sebelumnya, yakni perjanjian Jepara 1677,

---

<sup>9</sup> Komar Faridi. Skripsi: *Dinamika Kerajaan Mataram Islam Pasca Perjanjian Giyanti Tahun 1755-1830*. (Jember: Universitas Jember, 2017).

dan dampaknya bagi masyarakat yang terimbas dari wilayah yang digadaikan oleh Mataram.

Skripsi yang berjudul “*Politik Ekonomi VOC Di Kerajaan Mataram Masa Pemerintahan Amangkurat II Tahun 1677-1700*” karya Alam Encep Muhidin Gentar, seorang mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasannuddin pada tahun 2017, merupakan penelitian yang mengkaji mengenai politik terhadap kondisi ekonomi kerajaan Mataram selama masa transisi dari pemerintahan Amangkurat I ke pemerintahan Amangkurat II pada tahun 1677 sampai tahun 1700.<sup>10</sup>

Terdapat persamaan dalam fokus penelitian akibat dari adanya perjanjian Jepara 1677, namun, Alam lebih memfokuskan kajiannya pada lingkup yang berkaitan dengan kerajaan Mataram yang berdampak pada kondisi politik ekonominya setelah peristiwa perjanjian tersebut. Sementara, penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap dampak yang dihasilkan setelah perjanjian yang disepakati pada tahun 1677 bagi masyarakat Cirebon dan Priangan wilayah vasal Mataram yang dijadikan jaminan olehnya.

Jurnal berjudul “*Kontrak Cirebon-VOC Tahun 1699: Peran VOC Dalam Stabilitas Keamanan Cirebon*” oleh Tendi, seorang Dosen di Jurusan Sejarah Peradaban Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang diterbitkan pada tahun 2022 di *Socio Historia*, jurnal sejarah sosial Islam. Topik yang dibahas

---

<sup>10</sup> Alam Encep M. Skripsi: *Politik Ekonomi VOC Di Kerajaan Mataram Masa Pemerintahan Amangkurat II Tahun 1677-1700*. (Banten: UIN Sultan Maulana Hasannuddin, 2017).

dalam jurnal tersebut sangat relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Jurnal tersebut mengulas rangkaian perjanjian antara Cirebon dan VOC, yang merupakan salah satu akibat dari tergadaikannya wilayah tersebut kepada VOC melalui perjanjian Jepara 1677.<sup>11</sup>

Konteks ini menjadikan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sangat berkaitan, karena keduanya sama-sama membahas tentang perjanjian, meskipun dengan penekanan yang sedikit berbeda mengenai konflik dan wilayahnya.

## **G. Landasan Teori**

Landasan teori secara umum merupakan sebuah konstruksi argumentatif yang telah disusun secara teliti, berdasarkan pada definisi, konsep, dan proposisi yang terstruktur dengan baik sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.<sup>12</sup> Selain itu, landasan teori berfungsi sebagai pondasi yang kuat bagi penelitian, memastikan bahwa proses penelitian dilakukan dengan cermat dan terstruktur, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan memiliki makna yang signifikan.<sup>13</sup>

Menurut Nan Lin, teori terdiri dari sejumlah proposisi, yaitu pernyataan tentang bagaimana dua konsep atau lebih

---

<sup>11</sup> Tendi. "Kontrak Cirebon-VOC Tahun 1699: Peran VOC Dalam Stabilitas Keamanan Cirebon." *Jurnal Socio Historia*, Vol. 1, No. 2, 2022.

<sup>12</sup> Rusdin Tahir, et al. *Metodologi Penelitian (Teori, Masalah dan Kebijakan)*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 59.

<sup>13</sup> Tahir, et al. *Op cit.*, hlm 71.

saling terhubung.<sup>14</sup> Pada konteks ini, hubungan antara konsep-konsep dibentuk menjadi suatu sistem yang terstruktur sehingga memudahkan dalam memperoleh pemahaman yang lebih terorganisir dan sistematis tentang fenomena yang sedang diamati. Pemilihan suatu teori menjadi hal yang penting karena teori tersebut dapat dianalisis secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih terperinci tentang suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemunculan teori ini dipicu dari adanya ketimpangan sosial yang muncul akibat adanya konflik yang terjadi antara berbagai kelas sosial yang berbeda.<sup>15</sup> Pada konteks ini, perbedaan kepentingan di antara berbagai kelas sosial tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang berbeda, sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Menurut Karl Marx, teori konflik mencerminkan adanya konflik yang tak terhindarkan dalam dinamika sosial di kehidupan masyarakat.<sup>16</sup> Teori ini menjelaskan bahwa konflik tersebut muncul dari interaksi antara kelas-kelas sosial yang berbeda, struktur kekuasaan yang ada, dan peranan negara dalam mempertahankan kepentingannya masing-masing. Pemahaman yang berkembang terhadap ketiga elemen ini kemudian memicu terjadinya perubahan sosial dalam

---

<sup>14</sup> W. Gulo. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 8.

<sup>15</sup> Wahid Nur Tualeka. "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern" *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3 No. 1 (2017), hlm. 34.

<sup>16</sup> Pip Jones., et al. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-modernisme*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016), hlm. 48.

masyarakat.<sup>17</sup> Artinya, konflik berperan sebagai pendorong utama di balik perubahan sosial yang terjadi, karena adanya pertentangan antar kepentingan dalam kelas-kelas sosial, sehingga dapat menghasilkan transformasi dalam struktur dan tatanan masyarakat.

Menurut George Simmel, teori konflik melibatkan dinamika interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup> Melalui proses kompromi, interaksi tersebut pada akhirnya dapat menghasilkan integrasi, yang menjadikan keberadaan konflik sebagai mekanisme penting dalam membangun kerangka masyarakat yang lebih kuat dalam menciptakan perubahan sosial yang diperlukan.<sup>19</sup>

Ralph Dahrendorf juga berpendapat bahwa konflik di dalam masyarakat dipicu dari ketidaksetaraan distribusi kekuasaan dan status sosial yang ditentukan oleh kekuasaan.<sup>20</sup> Menurut pandangannya, ketidaksetaraan ini dapat menciptakan ketegangan yang menjadi pemicu konflik antara individu atau kelompok untuk mempertahankan atau untuk memperoleh kekuasaan dengan status yang lebih tinggi dalam struktur sosial masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Diah Retno D.H., et al. *Ringkasan Kumpulan Mazhab Teori Sosial (Biografi, Sejarah, Teori, dan Kritikan)*, (Makassar: CV Nur Lina, 2018), hlm. 62.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Sindung, Haryanto. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-modernisme*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Hlm. 46.

<sup>21</sup> Nur, Syam. *Model Analisis Teori Sosial*, (Jakarta: Kencana. 2022), hlm. 71.

Konflik dalam masyarakat diakibatkan dari adanya ketidaksetaraan yang mencakup antara kewenangan, kedudukan dan kepentingan. Dahrendorf memandang, bahwa masyarakat terbagi atas dua kelas utama berdasarkan siapa yang memiliki kewenangan atau kekuasaan, dan siapa yang tidak.<sup>22</sup> Kelas yang memiliki kewenangan cenderung memaksa masyarakat untuk mematuhi struktur dan aturan yang telah ditetapkan, sedangkan yang tidak memiliki kewenangan mendapatkan pengaruh dari kelas yang berkuasa. Namun, penting untuk dicatat, bahwa masyarakat tidak selalu berada dalam keadaan tertib dan teratur karena konflik dan ketegangan adalah bagian alami dari dinamika sosial.

Sementara itu, perbedaan dalam distribusi kekuasaan juga berperan dalam menghasilkan hierarki atau struktur yang mengatur hubungan antara individu atau kelompok sehingga bisa menyebabkan konflik.<sup>23</sup> Proses konflik, masyarakat dapat mencapai kesepakatan bersama melalui diskusi, dan negosiasi sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan dan membangun stabilitas yang lebih baik.

Melalui ketiga perspektif dari Marx, Simmel, dan Dahrendorf, dapat dipahami bahwa konflik sosial adalah fenomena yang kompleks dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, interaksi sosial, dan ketidaksetaraan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis

---

<sup>22</sup> Margaret M. Polma. *Sosiologi Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 134.

<sup>23</sup> Polma. *Op cit.*, hlm 136.

memutuskan untuk menggunakan teori konflik sebagai landasan teori dalam upaya menyelesaikan penelitian tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat di Cirebon dan Priangan pasca penandatanganan Perjanjian Jepara tahun 1677 antara Mataram dan VOC.

Memperkuat landasan teori dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ilmu politik untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya Cirebon dan Priangan dengan lebih sistematis. Deliar Noer mengemukakan pendapatnya, bahwa ilmu politik memusatkan perhatiannya pada permasalahan kekuasaan yang hadir dalam struktur kehidupan masyarakat.<sup>24</sup> Hal ini karena kekuasaan dipandang sebagai inti dari seluruh dinamika politik yang mengatur dan memengaruhi kelompok atau masyarakat agar sejalan dengan kehendak pihak yang berkuasa.

Demikian konteks penyelenggaraan, kekuasaan sering kali terjalin dalam hubungan yang terkait dengan konflik, di mana tindakan politik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan dan persaingan dari pihak-pihak yang berkuasa dengan melibatkan partisipasi politik, struktur kelembagaan dan proses pembuatan keputusan yang dipengaruhi oleh berbagai aspek di dalamnya.<sup>25</sup> Artinya, kekuasaan dan konflik merupakan dua

---

<sup>24</sup> Abu Maskur., dkk. "Deliar Noer: Sebuah Biografi Politik." *Jurnal Fajar Historia*, Vol. 6, No. 1, 2022. Hlm. 62.

<sup>25</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 47.

unsur yang saling berkaitan dan mempengaruhi dalam proses politik.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, penulis akan menggunakan pendekatan tersebut sebagai alat untuk menggali dampak yang dirasakan oleh masyarakat Cirebon dan Priangan setelah perjanjian Jepara tahun 1677 antara Mataram dan VOC. Pada analisis ini, konsep ilmu politik terbagi dalam tiga komponen utama, yaitu rakyat, negara sebagai entitas pemerintahan, dan kekuasaan sebagai pola sistem dalam pembuatan kebijakan yang dijadikan sebagai landasan.<sup>26</sup>

Hubungan sosial antara VOC dan Mataram menunjukkan bahwa masyarakat tergolong di dalam kelas bawah yang memiliki keterbatasan kekuasaan sehingga perjanjian Jepara dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengamankan posisi politik Amangkurat II, sekaligus untuk menstabilkan keadaan Mataram dari kericuhan yang disebabkan oleh pemberontakan yang dipimpin oleh Trunajaya. Meskipun demikian, konsekuensi dari perjanjian ini tidak terlepas dari dampak yang dirasakan oleh Cirebon dan Priangan yang menjadi jaminan dalam isi perjanjian yang termaktub. Ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan dijadikan sebagai alat untuk kepentingan dari masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Budiardjo. *Loc cit.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 49



## H. Metode Penelitian

Sejarah sebagai cabang ilmu memerlukan suatu pendekatan dan struktur metodologis yang terdefinisi dengan jelas. Hal ini memicu pada rangkaian prinsip-prinsip dan pedoman yang tersusun secara sistematis untuk memudahkan pengumpulan sumber-sumber sejarah dengan cara menilai atau memeriksa mereka, dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang tepat dan akurat tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau.<sup>28</sup>

Metode penelitian sejarah adalah cara yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami peristiwa masa lalu dengan cermat dan terstruktur sesuai dengan aturan dan prinsip dari ilmu sejarah itu sendiri. Menurut Louis Gottschalk, proses penelitian dalam bidang sejarah melibatkan serangkaian tahap pengujian dan analisis yang kritis terhadap sumber-sumber historis yang tersedia, dengan maksud untuk membangun kembali peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan data yang terkumpul dan dianalisis.<sup>29</sup>

Menurut Kuntowijoyo, pengkajian sejarah melibatkan lima langkah, yaitu: pemilihan tema, akuisisi sumber, verifikasi, interpretasi dan penulisan.<sup>30</sup> Tahapan-tahapan ini merupakan proses penting dalam penyusunan karya ilmiah bagi penelitian ini, yang juga termasuk dalam jenis riset pustaka (*library*

---

<sup>28</sup> Wasino dan Endah Sri Hartatik. *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), hlm. 11.

<sup>29</sup> Nina Herlina. *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2020), hlm. 2.

<sup>30</sup> Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), hlm. 69.

*research*). Oleh karena itu, penelitian ini bergantung pada informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang telah dianalisis, termasuk buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang terkait dengan topik penelitian ini.<sup>31</sup>

Berdasarkan metode penelitian sejarah, penulis menggunakan serangkaian langkah-langkah dalam penelitian ini. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Heuristik

Menurut istilah heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *heuriskein* yang berarti mendapatkan atau menemukan, merujuk pada langkah-langkah untuk memperoleh petunjuk mengenai masa lalu.<sup>32</sup> Pada konteks penelitian sejarah, heuristik mencakup teknik pencarian dan pengumpulan sumber-sumber historis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu peristiwa.

Pada tahapan ini, penulis melakukan penelusuran dan pengumpulan sumber sejarah terkait dengan sejarah Mataram Islam, terutama Perjanjian Jepara 1677 dan dampaknya terhadap masyarakat Cirebon dan Priangan. Penelitian ini melibatkan penelusuran sumber data yang berasal dari berbagai jenis literatur, termasuk arsip, buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik

---

<sup>31</sup> Zed Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), hlm. 3.

<sup>32</sup> Wasino dan Hartatik. *Op cit.*, hlm. 23.

penelitian. Sumber data yang telah diperoleh nantinya akan dikategorikan menjadi dua kelompok.

Pertama, sumber primer yang terdiri dari arsip-arsip bahasa Belanda dalam naskah perjanjian tahun 1677 antara Mataram dan VOC. Kedua, terdapat sumber sekunder yang meliputi buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang memberikan pandangan dan interpretasi tambahan terhadap topik yang diteliti.

Proses penelusuran sumber akan dilakukan secara menyeluruh, baik secara daring maupun luring melalui penelusuran bibliografi serta mengakses Perpustakaan Digital. Di samping itu, penulis juga akan melakukan kunjungan secara langsung ke Perpustakaan yang ada di IAIN Syekh Nurjati dan Perpustakaan Nasional untuk mengakses referensi yang tidak dapat diakses secara daring.

## 2. Verifikasi

Setelah melalui tahapan heuristik, penulis akan melakukan proses verifikasi terhadap sumber-sumber yang telah berhasil dikumpulkan. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk memastikan keabsahan terhadap keaslian dalam sumber-sumber tersebut, terutama terkait dengan Perjanjian Jepara 1677 dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pada masa itu.<sup>33</sup> Adapun proses verifikasi

---

<sup>33</sup> Aditia Muara Padiatra. *Ilmu Sejarah: Metode Dan Praktik*. (Gresik: JSI Press, 2020), hlm. 30.

dilakukan dengan melakukan dua jenis kritik yang berbeda, yaitu kritik eksternal dan internal.

Pada kritik eksternal, penulis akan mengevaluasi karakteristik fisik atau aspek luar dari sumber sejarah yang dikumpulkan.<sup>34</sup> Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pemalsuan atau keaslian dokumen, dengan memeriksa segala detail terkait dengan pembuatannya. Sedangkan kritik internal dilakukan untuk mengevaluasi isi atau substansi dari sumber sejarah tersebut.<sup>35</sup> Setelah itu, penulis akan menguji informasi yang terkandung di dalamnya untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data yang disajikan.

Melalui kedua tahapan kritik ini, penulis dapat mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya serta memastikan integritas dan ketepatan data yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

### 3. Interpretasi

Tahapan interpretasi merupakan langkah penting dalam proses penyusunan fakta-fakta sejarah yang akurat dan relevan. Pada tahap ini, penulis melakukan penafsiran terhadap informasi yang telah terkumpul serta mengaitkan fakta-fakta tersebut sehingga membentuk narasi atau cerita yang masuk dalam peristiwa sejarah yang diteliti.

---

<sup>34</sup> Kuntowijoyo. *Op cit.*, hlm. 77.

<sup>35</sup> Padiatra. *Op cit.*, hlm. 94.

Interpretasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu interpretasi analisis dan interpretasi sintesis. Interpretasi analisis adalah proses menafsirkan secara mendalam mengenai fakta-fakta yang terkumpul dengan mengurai dan menganalisisnya secara terperinci.<sup>36</sup> Melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap setiap detail data dan menyusunnya menjadi kesimpulan yang lebih bermakna. Di sisi lain, interpretasi sintesis melibatkan pengumpulan atau penyatuan sejumlah fakta yang relevan dan mengintegrasikannya menjadi satu kesatuan yang koheren.<sup>37</sup>

Penulis mencoba untuk menggabungkan berbagai informasi yang ada untuk membentuk gambaran keseluruhan tentang peristiwa sejarah yang sedang diteliti, yang kemudian penulis akan melakukan penarikan kesimpulan dari keseluruhan informasi yang terkumpul.

#### 4. Historiografi

Secara umum, historiografi adalah tahapan terakhir dalam proses penulisan sejarah. Ini merupakan bentuk penulisan yang menghasilkan narasi atau karya tulis yang koheren berdasarkan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan oleh penulis.<sup>38</sup> Pada konteks penelitian ini, tahap historiografi akan melibatkan penyusunan narasi sejarah yang menyeluruh dan mendalam tentang peristiwa

---

<sup>36</sup> M. Dien Madjid Dan Johan Wahyudi. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 226.

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> Padiatra. *Op cit.*, hlm. 36.

tersebut, yang mencakup dari serangkaian peristiwa, menggambarkan konteks historis, menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan politik, serta menarik kesimpulan yang relevan dari penelitian yang telah dilakukan.<sup>39</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

**Bab I**, berisikan; latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau *literature review*, landasan teori, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai kerangka yang sudah tersusun secara sistematis.

**Bab II**, terdiri dari tiga sub bab, yaitu; (1) Mataram Islam, dari berdiri sampai keruntuhannya, (2) dan pemberontakan Trunajaya.

**Bab III**, berisikan deskripsi dari Perjanjian Jepara 1677 dan hubungannya antara Mataram dengan Cirebon dan Priangan.

**Bab IV**, membahas mengenai dampak bagi kehidupan masyarakat setelah perjanjian 1677 di Cirebon dan Priangan yang saat itu statusnya masih menjadi sebagai gadaian.

**Bab V**, berupa penarikan kesimpulan sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini.

---

<sup>39</sup> Madjid & Wahyudi. *Op cit.*, hlm. 231.